

**EFEKTIVITAS PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5  
TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI  
KAWASAN TANPA ROKOK SURABAYA SELATAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam

Ilmu Hukum

Oleh:

**Rachdinda Pradigda Al-Qarano**

**115010100111105**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN****EFEKTIVITAS PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5  
TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK(STUDI DI KAWASAN  
TANPA ROKOK SURABAYA SELATAN)****Oleh :****RACHDINDA PRADIGDA AL-QARANO****NIM :115010100111105**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis penguji pada tanggal :10 Juli 2018

Dan telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

PembimbingPendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Murdin, S.H., M.Hum

NIP. 196008101986011002

NIP. 195612071986011001

Mengetahui,

KetuaBagian

DekanFakultasHukum

HukumAdministrasi Negara



RachmadSafa'at, SH., M.Si,

NIP. 196208051988021001



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 195612071986011001

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

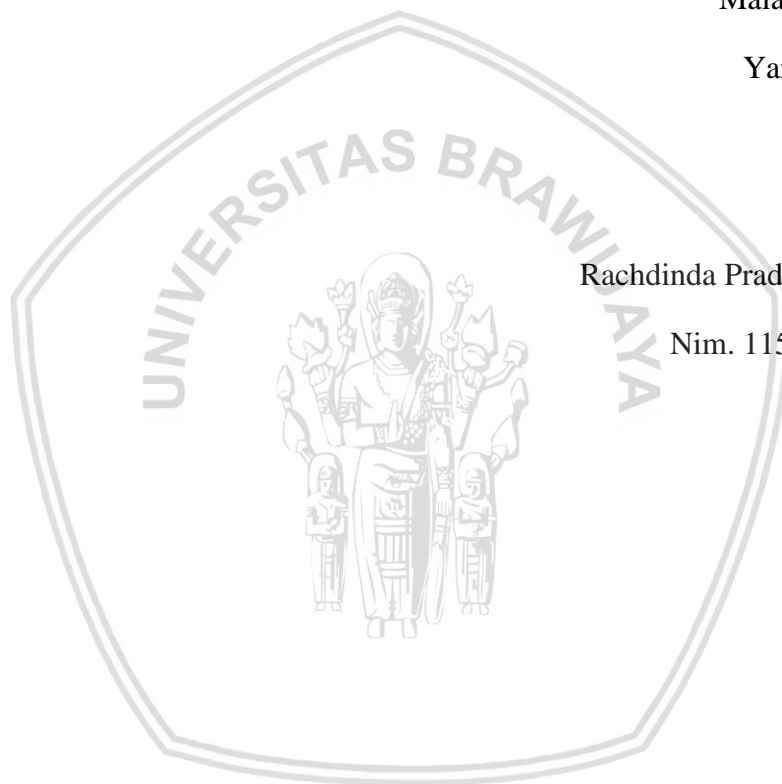
Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut gelar keserjanaan saya

Malang, 15 Juli 2018

Yang menyatakan,

Rachdinda Pradigda Al-Qarano

Nim. 115010100111105



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Implementasi pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Malang Terkait Bangunan Kawasan Cagar Budaya Jalan Ijen Nomor 75C Sebagai Tempat Usaha”.

Maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) dalam Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak di bantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang yang ada di sekeliling penulis baik yang bersifat formil maupun materiil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulusnya kepada :

1. Dr. RachmadSafa’at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi dan Dosen Pembimbing Utama atas segala bimbingan dan masukan selama proses pengajuan judul sampai terselesaikan
3. Nurdin, S.H., M.Hum, selaku dosen pendamping atas bimbingan dan masukan saran dan kritik selama proses pengerjaan skripsi.
4. Ibu Nur Laila selaku pengelola program Penyakit Tidak Menular yang membantu dan memberikan masukan, saran dan kritik serta memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini
5. Orang Tua, keluarga
6. Temen-temen seperjuangan sahabat,
7. Pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, mohon maaf jika penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga ada nilai positif dan bermanfaat dalam skripsi ini bagi pembaca sekalian, dan penulis tidak mampu membalas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah direlakan oleh semua pihak, semoga seluruh amal dan kebaikan dapat balasan dari Allah SWT.

Amin

WassalamualaikumWr. Wb

## RINGKASAN

Rachdinda P.A, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 13 April 2018, **EFEKTIVITAS PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**(STUDI DI **KAWASAN TANPA ROKOK SURABAYA SELATAN**) (Studi kasus di Kawasan Tanpa Rokok Surabaya), Lutfi Effendi, SH., M.Hum., Nurdin, SH., M.Hum.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan hal yang disebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimanakah Efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya? (2) Hambatan-hambatan apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data primer, sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis yuridis sosiologis, yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan dan kemudian dianalisis berdasarkan keadaan yang sebenarnya, literatur, jurnal, skripsi, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Peraturan Daerah Kota Surabaya Pasal 3 Nomor 5 Tahun 2008 masih belum efektif, karena masih banyak daerah yang ditemukan pelanggaran berkaitan dengan isi pasal tersebut. Daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang sudah berlaku efektif hanya terdapat di instansi Kesehatan, seperti rumah sakit, apotek, Dinas Kesehatan Dll.

Hambatan-hambatan yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya diantaranya adalah Besaran sanksi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan tersebut tidak berjalan efektif. Semuanya hanya sebatas diberikan teguran dan peringatan. Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan Pengawasan secara menyeluruh di setiap Kawasan Tanpa Rokok. anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan peranan faktual penegak hukum terlalu banyak, Karena penegak hukum nya kurang tegas maka masyarakatnya juga akan menyepelekan aturan yang berlaku. Selain itu yang jadi penghambat yaitu kurang nya respon masyarakat untuk menegur orang lain yang melakukan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v

**BAB I PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN .....	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. PERATURAN DAERAH.....	10
1. PENGERTIAN PERATURAN DAERAH.....	10
2. FUNGSI PERATURAN DAERAH .....	11
B. KAWASAN TANPA ROKOK.....	12
1. PENGERTIAN KAWASAN TANPA ROKOK.....	12
2. LARANGAN KAWASAN TANPA ROKOK.....	12
3. AKTIVITAS MEROKOK SEBAGAI KEGIATAN YANG DILARANG DI KAWASAN TANPA ROKOK.....	15
4. PENGAWASAN TERHADAP AKTIVITAS MEROKOK DI KAWASAN TANPA ROKOK .....	16
C. PENEGAKAN HUKUM.....	17
1. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM.....	17
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM.....	19

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. JENIS PENELITIAN .....	32
B. METODE PENDEKATAN PENELITIAN.....	32
C. LOKASI PENELITIAN DAN ALASAN PEMILIHAN LOKASI.....	32
D. JENIS DAN SUMBER DATA.....	33
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	33



F. POPULASI DAN SAMPEL.....	34
G. TEKNIK ANALISA DATA.....	34
H. DEFINISI OPERASIONAL.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN TENTANG KOTA SURABAYA.....</b>	<b>32</b>
1. SEJARAH KOTA SURABAYA.....	36
2. LETAK GEOGRAFIS KOTA SURABAYA.....	38
3. VISI DAN MISI KOTA SURABAYA.....	42
<b>B. GAMBARAN UMUM PENELITIAN DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA.....</b>	<b>44</b>
1. VISI DAN MISI.....	44
2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI.....	44
3. SUSUNAN ORGANISASI.....	45
<b>C. EFEKTIVITAS PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.....</b>	<b>48</b>
1. PERATURAN.....	49
2. APARATUR.....	50
3. SARANA DAN PRASARANA.....	53
4. PELAKSANAAN.....	54
5. KONDISI MASYARAKAT.....	54
<b>D. HAMBATAN-HAMBATAN YANG BERPENGARUH DALAM PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SURABAYA.....</b>	<b>65</b>
1. FAKTOR HUKUM.....	65
2. FAKTOR PENEGAK HUKUM.....	66
3. FAKTOR MASYARAKAT.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dimana setiap tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia juga dinyatakan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, Pemerintah menanggapi dengan serius masalah kesehatan, salah satunya ialah masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh asap rokok.

Bentuk keseriusan pemerintah menanggapi masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat asap rokok, dengan melihat sudah cukup banyaknya aturan yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok antara lain dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 49 Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Peraturan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam surat bernomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman



Pelaksanaan Kawasan Tanpa rokok, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini, kewenangan untuk membuat aturan tentang kawasan tanpa rokok berada pada pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah. Berdasarkan aturan tersebut, maka dibuatlah peraturan tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah kota Surabaya no.5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 3 pada peraturan daerah tersebut berbunyi, Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :

- a) memproduksi atau membuat rokok;
- b) menjual rokok;
- c) menyelenggarakan iklan rokok;
- d) mempromosikan rokok; dan/atau
- e) menggunakan rokok

Kawasan Tanpa Rokok adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok<sup>1</sup>..Adapun tujuan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ialah:

1. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
2. Melindungi penduduk usia produktif, anak remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
3. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
4. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain

Beberapa tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok,antara lain:

- a) sarana kesehatan;
- b) tempat proses belajar mengajar;
- c) arena kegiatan anak;
- d) tempat ibadah; dan
- e) angkutan umum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat 9 Peraturan daerah kota Surabaya no.5 tahun 2008

<sup>2</sup> Pasal 2 Ayat 2 Peraturan daerah kota Surabaya no.5 tahun 2008

Berdasarkan hasil pra survey penulis menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada kegiatan merokok di tempat umum yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Seperti di angkutan umum, tempat proses belajar mengajar(Sekolah/Universitas), bahkan di tempat ibadah

Pengaturan pembatasan terhadap orang yang merokok adalah kewajiban pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok, yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara internal pada masing-masing kawasan atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya, dan dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dengan cara melaporkan hasil evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala kepada Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan uraian latar belakang masalah di atas, dan pemaparan tentang kondisi nyata di lapangan, maka penulis ingin melihat apakah peraturan daerah yang berlaku sudah berjalan sesuai dengan tujuannya atau belum. Hal tersebut menjadikan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam dengan mengambil judul ***“EFEKTIVITAS PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK(STUDI KASUS DI KAWASAN TANPA ROKOK SURABAYA SELATAN)”***

Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber skripsi, tesis maupun laporan penelitian, maka diperoleh hasil penelitian terdahulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang berhubungan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1

## Orisinalitas Penulisan

No	Nama Peneliti dan Universitas	Judul Penelitian	Pembahasan	perbedaan
1	Rosita Candra Dewi	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI BAHAYA ROKOK (STUDI DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA)	Pada skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari bahaya rokok di Kota Surabaya.	Perbedaan antara penelitian ini dengan yang terdahulu ialah bahwa peneliti terdahulu membahas perlindungan hukum anak dari bahaya rokok, sedangkan penelitian yang akan diteliti saat ini adalah tentang efektivitas

				peraturan daerah yang berlaku tentang kawasan tanpa rokok pada suatu daerah
--	--	--	--	---

### C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya?

### D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Surabaya
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

### **1. Secara Teoritis**

- a) Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan di bidang Hukum Administrasi.
- b) Hasil yang ada dalam penelitian ini diharapkan dapat dan mampu memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang Kawasan Tanpa Rokok

### **2. Secara Praktis**

- a) Bagi Masyarakat :Untuk menambah wacana tentang Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Surabaya
- b) Bagi Mahasiswa :Untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kondisi lapangan yang terjadi akibat kurangnya pengawasan, sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan di Kawasan Tanpa Rokok

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Terdapat sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**



Bab ini menguraikan teori-teori pendukung yang digunakan peneliti dalam membahas permasalahan berkaitan dengan judul penelitian. Adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1 Peraturan Daerah
  - A Pengertian Peraturan Daerah
  - B Fungsi Peraturan Daerah
- 2 Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
  - A Pengertian Kawasan Tanpa Rokok
  - B Larangan di Kawasan Tanpa Rokok
    - 1) Merokok
    - 2) Menjual
    - 3) Mengiklankan
    - 4) Mempromosikan
    - 5) memproduksi
- 3 Penegakan Hukum
  - A Pengertian Penegakan Hukum
  - B Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
    - 1) Faktor Hukum
    - 2) Faktor Penegak Hukum
    - 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
    - 4) Faktor Masyarakat
    - 5) Faktor Kebudayaan

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

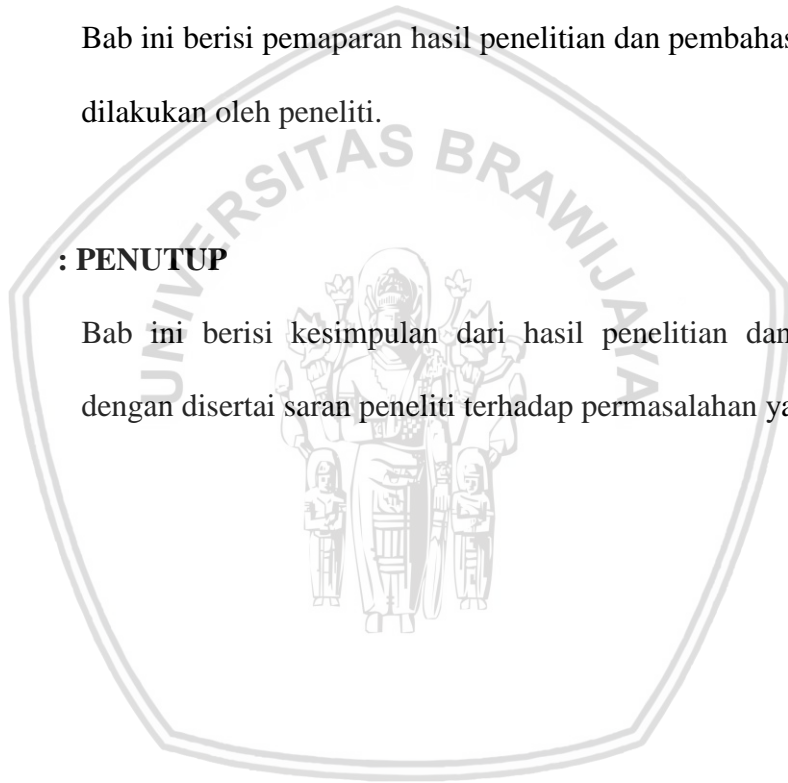
Bab ini menjelaskan metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian tersebut meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan dan penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dengan disertai saran peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Peraturan Daerah**

##### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

Pengertian Peraturan Daerah secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan membagi dua jenis peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>3</sup>

Peraturan daerah atau yang disingkat dengan Perda adalah produk hukum dari pemerintahan daerah itu sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi yang dibuat dan berlaku dalam wilayah daerah otonom yang bersangkutan. Peraturan daerah memiliki hak yurisdiksi setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang secara garis besar mengatur tentang:

1. Kejelasan tujuan;

---

<sup>3</sup> UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 8

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Keterbukaan.<sup>4</sup>

## 2. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang hak pembentukannya diberikan kepada daerah sebagai hak atribusi yang diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pengakuan dan konsekuensi atas asas otonomi. Sehingga fungsi peraturan daerah lebih pada pengaturan hal-hal dalam menjalankan fungsi otonomi dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah. Oleh karena itu, peraturan daerah dapat juga dianggap sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar.

Selain itu, Peraturan Daerah juga berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*delegate legislation*), yaitu (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Peraturan Presiden.

Dalam panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah yang disusun oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan, dikemukakan bahwa peraturan daerah mempunyai fungsi, yaitu:

---

<sup>4</sup>Siswanto Sunarno.2008.*Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*.Sinar Grafika.Jakarta.Hal

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UU NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah

## **B. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)**

### **1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok**

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.

### **2. Larangan di Kawasan Tanpa Rokok**

Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok melarang setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok melakukan kegiatan:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. menggunakan rokok.

#### **1) Memproduksi**

Memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.<sup>5</sup>

Secara umum, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok, telah disebutkan beberapa kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis ingin menganalisa lebih dalam terhadap pelanggaran kegiatan merokok yang dilakukan di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

#### **2) Menjual**

Menjual adalah kegiatan memperdagangkan barang atau memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Menjual

---

<sup>5</sup>Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan



produk tembakau di dalam area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran

### **3) Mengiklankan**

Mengiklankan adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan. Dalam mengiklankan produk tembakau, harus mencantumkan peringatan kesehatan, tidak menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan, tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok, tidak menampilkan anak, remaja dan wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan serta tidak bertentangan dengan norma asusila yang berlaku dalam masyarakat.

### **4) Mempromosikan**

Mempromosikan adalah kegiatan pengenalan atau penyebaran informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan. Pada hal ini, segala jenis promosi mengenai produk tembakau dilarang untuk dilakukan di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

### **5) Merokok**

Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap asap rokok. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimasukkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan

spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan

### **3. Aktivitas Merokok Sebagai Kegiatan yang Dilarang di Lokasi Kawasan Tanpa Rokok**

Pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, terdapat berbagai larangan kegiatan yang dilakukan di area yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:

- 1) memproduksi atau membuat rokok;
- 2) menjual rokok;
- 3) menyelenggarakan iklan rokok;
- 4) mempromosikan rokok; dan/atau
- 5) menggunakan rokok.

Salah satu kegiatan yang di larangan adalah kegiatan merokok. Untuk mendukung larangan tersebut, pada Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyatakan bahwa:

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkewajiban untuk :
  - a) membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
  - b) wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban untuk :

- a) menyediakan tempat khusus untuk merokok;
- b) membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatanlarangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok;
- c) wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2).

(3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan :

- a) terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai
- b) tempat dilarang merokok;
- c) dilengkapi dengan alat penghisap udara;
- d) memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka kegiatan merokok boleh dilakukan. Akan tetapi, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tempat khusus untuk merokok atau di luar dari area yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, sehingga tidak mengganggu hak orang lain yaitu setiap orang berhak untuk lingkungan yang baik dan sehat.

#### **4. Pengawasan Terhadap Aktivitas Merokok di Kawasan Tanpa Rokok**

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Walikota Surabaya berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok. Dimana dalam melaksanakannya, Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada kepala pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan

tugas dan fungsi masing-masing, seperti Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Kepala Dinas lainnya yang ditunjuk oleh Walikota.

Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktifitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 7 peraturan daerah kota Surabaya no 5 tahun 2008, Walikota memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok, dan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasannya, walikota dapat melakukan kegiatan berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, pimpinan Kawasan Tanpa Rokok, dan Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

### **C. Penegakan Hukum**

#### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum dalam suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan<sup>7</sup>. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, dan dalam proses penegakan hukum, memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah

---

<sup>6</sup> Ani Sri Rahayu, 2010, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara, Jakarta. Hal.331

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo.1983.*Masalah Penegakan Hukum*, Bandung:Sinar Baru.hal. 24

hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan*<sup>8</sup>

a. Kepastian hukum

merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

b. Kemanfaatan

Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus diperhatikan. Artinya, dalam pelaksanaan atau penegakan harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan<sup>9</sup>

Dalam menegakkan hukum, harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. hal. 145

<sup>9</sup> Ibid Hal. 146

Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara unsur tersebut<sup>10</sup>

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum<sup>11</sup>

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Faktor aparat penegak hukumnya;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat;
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. hal. 161

<sup>11</sup> Ishaq. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta. hal. 249



dibahas lebih lanjut di sini, dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>12</sup>

### 1) Faktor Hukum

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum yang juga dapat menyangkut peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, Undang-Undang lain yang lebih dahulu berlaku

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama. Rajawali Pers. Jakarta. hal 8

dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tersebut. Akan tetapi, makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama.

5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Artinya, supaya pembuat undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.<sup>13</sup>

Dalam asas pertama dinyatakan bahwa Undang-Undang tidak berlaku surut, padahal dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHAP dinyatakan, bahwa: “Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”. Pasal tersebut dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut.

Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian.

Persoalan lain yang mungkin timbul dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh karena penggunaan kata-kata yang

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto.1986,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama. Rajawali Pers:Jakarta.hal 7-8

artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.

Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya

## 2) Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “Penegak hukum” adalah luas sekali. Oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Namun, penegak hukum disini akan dibatasi pada kalangan yang secara khusus berkecimpung dalam bidang yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan (*role*). Oleh karena itu, maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu,

lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang seharusnya dilakukan (*actual role*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik ("*status conflict*" dan *conflict of roles*") kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu peranan ("*role-distance*").

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang sangat terkait oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Jadi bagaimana peranan yang sebenarnya menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni penegak hukum yang di satu pihak merupakan perundang-undangan dan di lain pihak merupakan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.

Di dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum sebaiknya mampu “mawas diri”, halmana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksana dari peranan aktualnya.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum. Mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil
- e. Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka merupakan suatu masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### **3) Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dan tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagaimana berikut:

- 1) Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul
- 2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang – ditambah
- 4) Yang macet – dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

### **4) Faktor Masyarakat**

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka



masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Secara garis besar, pendapat masyarakat mengenai hukum, sangat mempengaruhi kepatuhan hukum. Kiranya jelas bahwa hal ini ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama adalah berbagai pengertian atau arti pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif yang tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut,

yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisiannya atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perunahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang sinambung dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan

yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.

### **5) Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahklakan;
- 3) Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertarikan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebiasaan. Pasangan nilai kebendaan dan keahklakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataannya pada masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena berbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan modernisasi di bidang materil. Misalnya tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keahklakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi, akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan semata. Salah satu akibat dari pada penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahklakan,

adalah bahwa di dalam proses pelebagaan hukum dan masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolak ukur kewibawaan hukum.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovarisme, senantiasa berperan dalam pengembangan hukum, oleh Karena itu, satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "*status-quo*". Dilain pihak, ada anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dari ulasan-ulasan yang telah dijabarkan, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Penegak Hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan. Yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatinya penegak hukum pada pola isolasi adalah antara lain:

- 1) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum, dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
- 2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- 3) Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi, memberikan “cap” yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
- 4) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

Namun dibalik itu semua, di dalam konteks sosial tertentu, pola isolasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, yakni antara lain:

- 1) Hubungan yang formal dalam interaksi sosial dapat merupakan faktor yang mantap bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum.
- 2) Apabila penegak hukum merupakan pelopor perubahan hukum, maka kedudukan yang lebih dekat pada pola isolasi akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melaksanakan fungsi tersebut.
- 3) Adanya kemungkinan bahwa tugas-tugas penegak hukum secara paralel berlangsung bersamaan dengan perasaan anti penegak hukum, namun dalam keadaan damai.
- 4) Memungkinkan berkembangnya profesionalisasi bagi para penegak hukum.

Beberapa faktor yang mendekatkan pada pola interaksi adalah antara lain, sebagai berikut:

- 1) Bagian terbesar warga masyarakat menerima penegak hukum sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, walaupun belum tentu ada pengetahuan dan kesadaran yang sungguh-sungguh.
- 2) Warga masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta bendanya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi penelitian. Dalam hal ini konteks penelitian empiris adalah penelitian terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Alasan penulis memilih yuridis adalah berdasar judul yang diangkat yaitu Efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok terkait Kawasan Tanpa Rokok apakah sudah berjalan dengan fungsinya atau belum.

##### **B. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji Peraturan Daerah Kota Surabaya Pasal 3 nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Maka dari itu penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah dan dampak yang ditimbulkan.

##### **C. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi**

Lokasi yang penulis pilih dalam melakukan penelitian ini yaitu : Beberapa tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di Surabaya selatan (SMA Negeri 15 Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Masjid Agung Al-Akbar Surabaya). Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kota



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi penelitian. Dalam hal ini konteks penelitian empiris adalah penelitian terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Alasan penulis memilih yuridis adalah berdasar judul yang diangkat yaitu Efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok terkait Kawasan Tanpa Rokok apakah sudah berjalan dengan fungsinya atau belum.

##### **B. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji Peraturan Daerah Kota Surabaya Pasal 3 nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Maka dari itu penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah dan dampak yang ditimbulkan.

##### **C. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi**

Lokasi yang penulis pilih dalam melakukan penelitian ini yaitu : Beberapa tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di Surabaya selatan (SMA Negeri 15 Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Masjid Agung Al-Akbar Surabaya). Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kota

Surabaya, di Surabaya. Penulis memilih lokasi tersebut karena dinas tersebut merupakan Pembina dan Pengawas dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, dan sudah seharusnya, sebagai Unit Kerja terkait yang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, memberikan bukti bahwa Dinas tersebut telah bebas dari pelanggaran KTR. Serta dinas tersebut sangat berhubungan dengan materi yang penulis bahas dalam skripsi ini dan juga untuk mendapatkan data yang akurat.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis data yaitu,

##### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan observasi (pengamatan langsung) dan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas. Data primer diperoleh dari dinas kesehatan Kota Surabaya

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan hukum, jurnal, skripsi perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Brawijaya

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris sehingga analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu memaparkan data-data yang diperoleh peneliti secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan analisis yang

ada pada kerangka teoritis yang telah dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti dapat membahas dan menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terpadu sehingga pada akhirnya dapat menjelaskan, mendeskripsikan, serta menganalisis mengenai penggunaan Kawasan Tanpa Rokok

#### **F. Populasi Dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki kesamaan, yang meliputi himpunan dari orang atau benda, kejadian, kasus-kasus yang dibatasi pada periode dan lokasi tertentu. Populasi yang penulis pilih dalam melakukan penelitian ini yaitu, Beberapa tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di Surabaya selatan (SMA Negeri 15 Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Masjid Agung Al-Akbar Surabaya, Rumah Sakit Islam Surabaya, Angkutan umum)

Sampel adalah proses dalam memilih bagian yang representatif dari sebuah populasi. Sampel mewakili jenis informasi dan kebutuhan yang diperlukan. Sampel dari penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya, di Surabaya

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dapat dilakukan melalui mengkaji, mengelola, dan membahas informasi yang diperoleh peneliti secara ilmiah, studi kepustakaan maupun studi dokumentasi terhadap data yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan-perpustakaan pada instansi yang terkait ataupun penelusuran melalui internet. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif

analisis meliputi hasil wawancara, terutama hasil wawancara yang merupakan proses suatu kejadian

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah Batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variable-variable (konsep) yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya. Untuk itu peneliti akan memberikan pendapat mengenai definisi operasional dari judul yang diambil dalam penelitian sebagai berikut:

### **1. Efektivitas Peraturan Daerah**

Efektivitas Peraturan Daerah adalah suatu tindakan yang dilakukan individu, kelompok, pejabat, instansi pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan Peraturan Daerah.

### **2. Kawasan Tanpa Rokok**

Kawasan Tanpa Rokok adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.

### **3. Kawasan Terbatas Merokok**

Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Kota Surabaya

##### 1. Sejarah Kota Surabaya

Peristiwa Sepuluh November 1945 merupakan peristiwa paling bersejarah bagi kota Surabaya. Keberanian arek-arek Suroboyo-sebutan bagi orang Surabaya menghadapi pasukan sekutu tergambar jelas dalam peristiwa tersebut. Peristiwa Sepuluh November 1945 bermula ketika pihak sekutu mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato atau Hotel Orange yang kini dikenal dengan nama Hotel Majapahit. Rakyat yang melihat bendera tersebut merasa marah karena Indonesia sudah merdeka sehingga pihak sekutu tidak berhak mengibarkan bendera mereka di wilayah Indonesia. Rakyat pun meminta agar pihak sekutu menurunkan bendera tersebut namun pihak sekutu menolak permintaan rakyat Surabaya.

Penolakan tersebut membuat kemarahan rakyat tidak terbendung lagi. Rakyat akhirnya menerobos masuk dan saling membantu menaiki tiang bendera merah putih biru. Salah satu di antara rakyat kemudian menyobek warna biru bendera hingga yang tersisa hanya warna merah dan putih. Peristiwa penyobekan bendera ternyata membuat pihak sekutu semakin berambisi menguasai wilayah Surabaya. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak sekutu demi mewujudkan ambisi mereka, mulai dari penyerangan hingga

perundingan dengan para pemimpin yang hasilnya cenderung merugikan rakyat.

Para pemuda dan seluruh warga tidak bisa tinggal diam dengan perlakuan pihak sekutu. Demi membela tanah air, para pemuda dan seluruh warga bersatu melawan sekutu meskipun persenjataan yang dimiliki tidak secanggih milik sekutu. Pertempuran tersebut menewaskan pemimpin pihak sekutu Brigadir A.W.S Mallaby. Tewasnya Brigadir A.W.S Mallaby di tangan pemuda menandakan kekalahan pihak sekutu. Peristiwa Sepuluh November 1945 menjadi peristiwa yang berharga dan bersejarah. Oleh karena itu, tanggal sepuluh November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Berkat peristiwa itu pula, kota Surabaya mendapat sebutan sebagai Kota Pahlawan.

Peristiwa Sepuluh November memberi teladan tentang nilai-nilai kepahlawanan. Selain peristiwa Sepuluh November, peristiwa bersejarah lainnya yang juga terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan adalah peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dengan Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Pertempuran tersebut diawali oleh ekspedisi yang dilakukan oleh Kubilai Khan untuk menghancurkan Kerajaan Singasari yang tidak mau tunduk pada kekaisaran Mongol. Pada waktu itu raja Kerajaan Singasari adalah Kertanegara. Namun, pada saat pasukan Mongol tiba, Singasari tidak lagi dikuasai oleh Kertanegara. Jayakatwang berhasil merebut kekuasaan Kertanegara dan menjadikan dirinya sebagai penguasa baru Kerajaan Singasari.

Singkat cerita, pasukan Mongol tetap ingin menyerang Singasari meskipun penguasa Singasari bukan Kertanegara. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk bekerja sama dengan pasukan Mongol demi menghancurkan Jayakatwang. Pasukan Mongol ternyata berhasil mengalahkan Jayakatwang. Pada saat pasukan Mongol merayakan kemenangan mereka di Ujung Galuh sekarang Surabaya pasukan Raden Wijaya melakukan penyerangan mendadak. Pasukan Mongol pun kalang kabut dan memutuskan kembali ke Mongol. Kepergian pasukan Mongol menandakan kemenangan Raden Wijaya sebagai penguasa baru dan mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Majapahit. Peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dengan Pasukan Mongol ternyata begitu bersejarah hingga tanggal pertempuran tersebut diabadikan sebagai hari jadi kota Surabaya, yaitu 31 Mei 1293.

## **2. Letak Geografis Kota Surabaya**

### **a. Peta Kota Surabaya**

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.



Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30°C dan minimum 25°C.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 163 Kelurahan yaitu:

Tabel 2

No.	Kecamatan	Kelurahan
1	Asemrowo	Asemrowo, Genting Kalianak, Tambak Sarioso
2	Benowo	Kandangan, Romokalisari, Sememi, Tambak Osowilangun
3	Bubutan	Alun-Alun Contong, Bubutan, Gundih, Jepara, Tembok Dukuh
4	Bulak	Bulak, Kedungcowek, Kenjeran, Sukolilo Baru
5	Dukuh Pakis	Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Gunung Sari, Pradah Kalikendal
6	Gayungan	Dukuh Menanggal, Gayungan, Ketintang, Menanggal
7	Genteng	Embong Kaliasin, Genteng, Kapasari, Ketabang, Peneleh
8	Gubeng	Airlangga, Barata Jaya, Gubeng, Kertajaya, Mojo, Pucangsewu
9	Gunung Anyar	Gunung Anyar, Gunung Anyar Tambak, Rungkut Menanggal, Rungkut Tengah
10	Jambangan	Jambangan Karah, Kebonsari, Pagesangan
11	Karangpilang	Karang Pilang, Kebraon, Kedurus, Warugunung
12	Kenjeran	Bulakbanteng, Tambakwedi, Tanah Kalikedinding, Sidotopo Wetan
13	Krembangan	Dupak, Kemayoran, Krembangan Selatan, Morokrembangan, Perak Barat
14	Lakarsantri	Bangkingan, Jeruk, Lakarsantri, Lidah Kulon, Lidah Wetan, Sumur Welut
15	Mulyorejo	Dukuh Sutorejo, Kalijudan, Kalisari, Kejawan Putih Tambak, Manyar Sabrangan, Mulyorejo

16	Pabean Cantikan	Bongkaran, Krembangan Utara, Nyamplungan, Perak Timur, Perak Utara
17	Pakal	Babakan Jerawat, Pakal, Sumberejo
18	Rungkut	Kali Rungkut, Kedung Baruk, Medokan Ayu, Penjaringan Sari, Rungkut Kidul, Wonorejo
19	Sambikerep	Benowo, Bringin, Lontar, Made, Sambikerep
20	Sawahan	Banyuwir, Kupangkrajan, Pakis, Patemon, Putat Jaya, Sawahan
21	Semampir	Ampel, Pegirian, Sidotopo, Ujung, Wonokusumo
22	Simokerto	Kapasan, Sidodadi, Simokerto, Simolawang, Tambakrejo
23	Sukolilo	Gebang Putih, Keputih, Klampisngasem, Medokan Semampir, Menur Pumpungan, Nginden Jangkungan, Semolowaru
24	Sukomanunggal	Putatgede, Simomulyo, Simomulyo Baru, Sono Kuwijen, Sukomanunggal, Tanjungsari
25	Tambaksari	Dukuh Setro, Gading, Kapas Madya, Pacar Keling, Pacar Kembang, Ploso, Rangkah, Tambaksari
26	Tandes	Balongsari, Banjar Sugihan, Karang Poh, Manukan Kulon, Manukan Wetan, Tandes
27	Tegalsari	Dr. Sutomo, Kedungdoro, Keputran, Tegalsari, Wonorejo, Tegalsari, Surabaya
28	Tenggilis Mejoyo	Kendangsari, Kutisari, Panjang Jiwo, Tenggilis Mejoyo
29	Wiyung	Babatan, Balaskumprik, Jajar Tunggal, Wiyung
30	Wonocolo	Bendul Merisi, Jemur Wonosari, Margorejo, Sidosermo, Siwalan

		Kerto
31	Wonokromo	Darmo, Jagir, Ngagel, Ngagelrejo, Sawunggaling, Wonokromo

### b. Arti Lambang Kota Surabaya

Simbol kota Surabaya yang sampai sekarang masih digunakan ini dikeluarkan oleh DPRS kota Surabaya dengan Surat Keputusan No. 34/DPRS tanggal 19 Juni 1955 dan dikuatkan oleh Surat Keputusan Presiden (Keppres RI) No. 193 tahun 1956 pada tanggal 14 Desember 1956 yang isinya sebagai berikut.

1. Simbol berbentuk perisai segi enam, artinya melindungi kota Surabaya.
2. Tombak berukir, artinya isyarat perjuangan pemuda Surabaya dalam memperjuangkan kemerdekaan dari tangan kolonialisme penjajah.
3. Simbol ikan sura dan buaya atau suro ing baya, artinya pemuda Surabaya tidak gentar menghadapi bahaya.
4. Warna biru, hitam, putih keperakan, dan kuning emas terlihat bersih dan bersinar kemilau sebagai lambang mata air.

### c. Visi dan Misi Kota Surabaya

#### 1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan

berlandaskan kepada dasar filosofis yang dianut oleh masyarakat maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Surabaya tahun 2016-2021:

“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”

## 2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kota Surabaya, maka dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi pembangunan kota berikut :

- 1) Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas.
- 2) Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.
- 3) Memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- 4) Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota.
- 5) Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.
- 6) Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.
- 7) Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional.
- 8) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- 9) Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.
- 10) Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

## **B. Gambaran Penelitian tentang Dinas Kesehatan Kota Surabaya**

### **1. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

Visi dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya adalah “Dinas Kesehatan yang Profesional untuk mewujudkan masyarakat Surabaya sehat, mandiri dan berdaya saing global”

#### **b. Misi**

Dalam mewujudkan Dinas Kesehatan yang Profesional untuk mewujudkan masyarakat Surabaya sehat, mandiri dan berdaya saing global maka perlu ditempuh misi sebagai berikut

- 1) Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan;
- 2) Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan;
- 3) Meningkatkan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

### **2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

- a. Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah yang dapat mendukung penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang kesehatan yang dipimpin

oleh Kepala Kantor yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan

c. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum
- 2) Perumusan Kebijakan teknis di bidang kesehatan
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesehatan
- 4) Pengelolaan ketatausahaan dinas, dan
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

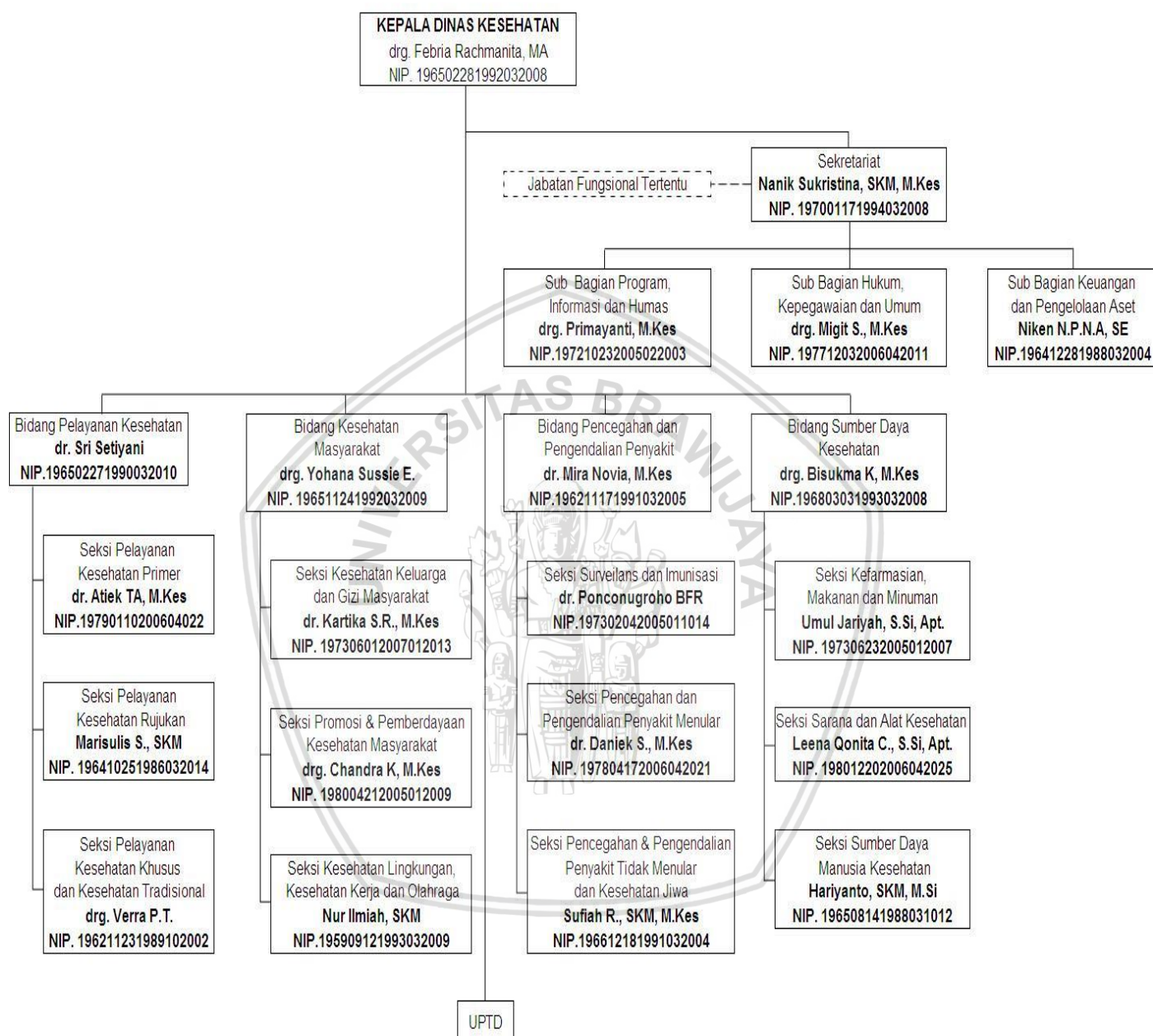
### 3. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dibantu oleh satu Sekretariat dan empat Bidang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, dan Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya No. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya, terdiri dari:



- a) Kepala Dinas Kesehatan
- b) Sekretariat
  - 1) Sub. Bagian Program, Informasi dan Humas
  - 2) Sub. Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
  - 3) Sub. Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
- c) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
  - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
  - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Kesehatan Tradisional.
- d) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
  - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
  - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
  - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- e) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi
  - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- f) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
  - 1) Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman
  - 2) Seksi Sarana dan Alat Kesehatan
  - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Gambar 1



### **C. Efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Pada bagian ini permasalahan dalam suatu kebijakan, sebuah ukuran-ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Karena dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan inilah kita dapat memproyeksikan bagaimana kebijakan dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuannya. Sebuah ukuran kebijakan juga harus disesuaikan dengan keadaan sosiokultural dimana kebijakan tersebut dijalankan. Jika kebijakan tersebut ingin terlaksana dengan maksimal. Maka kebijakan tersebut haruslah menyesuaikan dengan keadaan masyarakat selaku pelaksana dari kebijakan tersebut terutama di daerah yang menjadi fokus sampel dalam penelitian ini.

Efektivitas berasal dari kata efek yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat atau dampak. Efektif yang artinya berhasil, Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk yang menghasilkan yang spesifik yang terukur<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:

---

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, 2007 Jakarta

1. Dapat mencapai tujuan yang telah dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta pelaksana
2. Hukum efektif apabila di dalam masyarakat, warganya berperilaku sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh hukum

Efektivitas hukum menyoroti tentang bagaimana suatu peraturan yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga untuk mengukur efektivitas dari suatu peraturan dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Jika peraturan tersebut telah mencapai tujuannya, maka peraturan tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah:

#### **1. Peraturan**

Suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau mudah dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna, dan tidak membingungkan, maka efektivitas hukum akan mudah tercapai.

Dalam hal ini tentu yang jadi peraturan yang mengikat adalah Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa dilarang

- 1) memproduksi atau membuat rokok;
- 2) menjual rokok;
- 3) menyelenggarakan iklan rokok;
- 4) mempromosikan rokok; dan/atau
- 5) menggunakan rokok.

Di Kawasan Tanpa Rokok

## 2. Aparatur

Aparatur dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparatur juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipasti, yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparatur karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.

Setiap Kawasan Tanpa Rokok mempunyai penanggung jawab pada setiap daerahnya masing-masing, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Perda Surabaya nomor 5 tahun 2008.

Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkewajiban untuk :

- a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
- b. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3.

Penulis melakukan survey di beberapa tempat di Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya Selatan berupa wawancara untuk mengetahui apakah

sudah terlaksana dengan baik atau belum tugas dari penanggung jawab setiap daerah di Kawasan Tanpa Rokok.

Yang pertama adalah dengan Bapak Ardhi, Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Beliau mengatakan :

“Di Fakultas ini kalau ada yang merokok di lingkungan kampus tidak ada yang menegur, baik itu mahasiswa, dosen, atau petugas keamanan yang ada di sekitar situ. Cuman kalau di ruangan tertutup seperti di kelas, di ruang dosen/staff sudah pasti akan di tegur”<sup>15</sup>

Selanjutnya penulis menanyakan apakah pernah ada pemberian sanksi serius seperti pembuatan surat pernyataan atau bahkan di laporkan ke pihak yang berwenang. Beliau mengatakan :

“Oh, kalau sampai seperti itu saya rasa belum pernah”

Wawancara ke dua dilakukan penulis di sebuah angkutan umum kode “P(Ketintang)” dengan jurusan Petojo(Karang Menjangan)-Ketintang dengan supir angkot nya yaitu Bapak Joko.

Beliau Mengatakan :

“Setiap hari saya nyupir pasti ada penumpang yang merokok, ya saya tidak mau negur soalnya udah biasa dari dulu ada penumpang angkot saya yang merokok”<sup>16</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan petugas keamanan(Security) di SMP&SMA Al-Hikmah Surabaya.

---

<sup>15</sup> Wawancara tanggal 23 Maret 2018

<sup>16</sup> Wawancara tanggal 23 Maret 2018



Beliau mengatakan :

“Kalau ada siswa/siswi yang merokok di sekolah ini sudah pasti akan diberikan sanksi yang sangat berat oleh guru gurunya. Saya sendiri pernah melaporkan murid yang ketahuan merokok di parkiran sekolah dan langsung saya laporkan ke guru BK nya”<sup>17</sup>

Beliau menambahkan

“Supir-supir yang biasa nunggu anak pulang sekolah di sediakan tempat khusus untuk merokok, kalau merokok nya di tempat yang tidak diperbolehkan akan kami berikan teguran langsung”

Dinas Kesehatan sebagai kepala tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok sangat berperan penting dalam pengawasan. Ibu Nur Laila selaku pengelola program Penyakit Tidak Menular mengatakan :

“Jika terdapat instansi kesehatan, tempat belajar mengajar, atau tempat lain yang di tetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok tidak memasang papan/poster peringatan dilarang merokok kami akan memberikan sanksi. Teguran yang pertama adalah teguran ringan, jika masih belum dilaksanakan setelah teguran pertama maka akan diberikan teguran secara tertulis. Jika masih belum di laksanakan maka akan di laporkan ke Pengadilan Negeri”

---

<sup>17</sup> Wawancara Tanggal 23 Maret 2018



“Untuk Fasilitas Kesehatan Bisa saja dilakukan pencabutan izin jika tidak mengindahkan teguran Dinas Kesehatan mengenai Kawasan Tanpa Rokok”<sup>18</sup>

Dari pengamatan penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor aparaturnya menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam terlaksananya suatu peraturan. Dalam Khusus Kawasan Tanpa Rokok, jika dari aparaturnya sendiri tidak tegas maka masyarakatnya akan berani untuk melakukan pelanggaran. Menurut penulis, Dinas Kesehatan yang ditunjuk sebagai tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya sudah melakukan tugas pengawasan dengan baik. Sudah terpasang Papan/Poster peringatan di larang merokok hampir di setiap Kawasan Tanpa Rokok (walaupun masih belum semua daerah). Teguran untuk setiap daerah Kawasan Tanpa Rokok juga sudah baik. Namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pengawasan dari tiap-tiap Daerah

### **3. Sarana dan Prasarana**

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin

---

<sup>18</sup> Wawancara Tanggal 24 Maret 2018

penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

#### **4. Pelaksanaan**

Faktor-faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan efektifitas hukum adalah pelaksanaan dari peraturan itu sendiri salah satu upaya agar masyarakat mematuhi hukum adalah dengan mencantumkan sanksi atau hukuman jika peraturan dilanggar. Ketentuan adanya sanksi ini bertujuan agar masyarakat patuh atau taat peraturan yang ada sehingga peraturan yang ada tersebut dapat berlaku secara efektif.

#### **5. Kondisi Masyarakat**

Penetapan suatu peraturan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana peraturan tersebut diberlakukan karena jika tidak maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu biasanya peraturan yang tingkatannya lebih tinggi seperti Undang-Undang hanya mengatur masalah yang sifatnya umum, masalah yang sifatnya detail diatur pada peraturan yang lebih rendah. Secara konseptual, maka inti dari efektifitas hukum terletak pada bagian menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan mempertahankan bagaimana menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa masalah utama dari efektifitas penegakan hukum sebenarnya terletak dari indikator yang memungkinkan dapat dikatakan efektif atau tidak. Indikator mempunyai

arti netral. Sehingga dapat muncul sisi positif atau negatif yang terletak pada isi indikator. Begitu juga dengan tujuan dari kebijakan harus mampu membawa kepuasan dan manfaat bagi seluruh agen pelaksana dalam implementasi kebijakan tersebut

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok di sahkan dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dan Pasal 20 Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Walikota membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama merupakan penelitian dengan cara melihat gambaran responden terhadap Kawasan Tanpa Rokok dengan cara menggunakan kuisioner pada masyarakat dengan jumlah sample sebanyak 100 orang yang tersebar pada 3 kawasan tanpa rokok di Surabaya selatan yang meliputi, tempat berjalannya belajar mengajar, dan tempat beribadah yang merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan

Tanpa Rokok. Yang ke dua adalah Penelitian dengan cara wawancara dengan Tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya yaitu Dinas Kesehatan.

### 1. Analisis Responden

Pengumpulan data dilakukan tanggal 6 Maret sampai 8 Maret 2018. Data primer diperoleh dengan cara metode melakukan pengisian langsung menggunakan kuisioner yang diberikan kepada responden.

### 2. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden. Berdasarkan keseluruhan responden yang ada, diperoleh gambaran mengenai karakteristiknya meliputi: usia, pendidikan, pekerjaan, sikap dan pengetahuan responden.

Data lengkap mengenai karakteristik responden tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel yang ada di bawah ini.

#### 2.1 Usia Responden

Jumlah sample sebanyak 60 responden, yang diambil secara acak dari Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya Selatan.

Tabel 2.1

Usia	Frekuensi	%
<20 tahun	15	25%
20-25 tahun	30	50%
>25 tahun	15	25%
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

Diperoleh bahwa 25% dari seluruh responden berumur kurang dari 20 tahun, 50% berumur 20 hingga 25 tahun, dan 25% berusia lebih dari 25 tahun.

## 2.2 Pendidikan

Tabel 2.2

Pendidikan	Frekuensi	%
Dasar	3	5%
Menengah	15	25%
Tinggi	42	70%
Total	60	100%

Dapat dilihat bahwa dari jumlah sample sebanyak 60 responden, terdapat responden dengan tingkat pendidikan dasar(SD,SMP) sebanyak 5%, pendidikan menengah (SMA atau sederajat) 25% dan pendidikan tinggi(Diploma atau Sarjana) sebesar 70%

## 2.3 Pekerjaan

Tabel 2.3

Pekerjaan	Frekuensi	%
Tidak bekerja	42	70%
Petani/Buruh	9	15%
Wiraswasta/Swasta	2	3,3%
PNS	7	11,7%
Total	60	100%

Berdasarkan data yang telah di dapat, terdapat 70% responden tidak bekerja, petani atau buruh sebanyak 15%, wiraswasta/swasta sebanyak 3,3%, dan PNS sebanyak 11,7%

#### 2.4 Kebiasaan Merokok

Tabel 2.4

Kebiasaan	Frekuensi	%
<b>Merokok</b>		
<b>Ya</b>	17	28,3%
<b>Tidak</b>	43	71,7%
<b>Total</b>	60	100%

Berdasarkan jawaban 60 responden dari kuisisioner yang telah dibagikan, diperoleh data yaitu sebesar 28,3% mempunyai kebiasaan merokok, sisanya 71,7% tidak mempunyai kebiasaan merokok

#### 2.5 Kebiasaan Merokok di Kawasan Tanpa Rokok

Tabel 2.5

Kebiasaan	Frekuensi	%
<b>Merokok di Kawasan Tanpa Rokok</b>		
<b>Ya</b>	15	88,24%

<b>Tidak</b>	2	11,76
<b>Total</b>	17	100%

Berdasarkan data yang diperoleh dari 17 Responden yang merokok, diketahui bahwa 88,24% menjawab bahwa terdapat kebiasaan merokok di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok, 11,76% yang lain tidak mempunyai kebiasaan merokok di Kawasan Tanpa Rokok

## 2.6 Tahu Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Tabel 2.6

<b>Tahu</b>	<b>tentang</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
<b>Istilah KTR</b>			
<b>Tahu</b>		23	38,3%
<b>Tidak Tahu</b>		37	61,7%
<b>Total</b>		60	100%

Dapat dilihat bahwa 38,3% responden sudah mengetahui tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebaliknya 61,7% responden belum mengetahui istilah Kawasan Tanpa Rokok

## 2.7 Pengetahuan

Tabel 2.7

<b>Pengetahuan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
<b>Baik</b>	6	10%
<b>Cukup</b>	31	51,7%



<b>Kurang</b>	23	38,3%
<b>Total</b>	60	100%

Pengetahuan tentang Kawasan Tanpa Rokok di bedakan menjadi 3 kategori, yaitu responden yang berpengetahuan baik, cukup, dan kurang. Berdasarkan data yang di dapat, 10% merupakan Responden berpengetahuan baik, sedangkan responden berpengetahuan cukup 51,7% dan responden berpengetahuan kurang sebanyak 38,3%

## 2.8 Sikap terhadap Pelanggar Aturan Kawasan Tanpa Rokok

Sikap Responden terhadap aturan Kawasan Tanpa Rokok dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sikap menegur terhadap pelanggar di Kawasan Tanpa Rokok dan sikap tidak menegur terhadap pelanggar di Kawasan Tanpa Rokok

Tabel 2.8

<b>Sikap</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
<b>Menegur</b>	10	16,7%
<b>Tidak Menegur</b>	50	83,3%
<b>Total</b>	60	100%

Sikap Responden terhadap aturan Kawasan Tanpa Rokok yaitu sebesar 16,7% bersikap menegur dan 83,3% bersikap tidak menegur terhadap aturan Kawasan Tanpa Rokok

## 2.9 Informasi tentang Pelanggaran Aturan Kawasan Tanpa Rokok

### 2.9.1 Pelanggaran Berupa Merokok di Tempat Umum

Informasi tentang pelanggaran aturan Kawasan tanpa rokok berupa merokok di tempat umum di bagi menjadi 3,yaitu pernah melihat, sering melihat, dan tidak pernah melihat.

Tabel 2.9.1

Melihat Orang lain	Frekuensi	%
<b>Merokok di KTR</b>		
<b>Pernah</b>	55	91,7%
<b>Sering</b>	3	5%
<b>Tidak Pernah</b>	2	3,3%
<b>Total</b>	60	100%

Terdapat 91,7% Responden yang pernah melihat orang merokok di lokasi tersebut (Kawasan Tanpa Rokok), 5% sering, dan 3,3% tidak pernah melihat orang yang melakukan pelanggaran berupa merokok di lokasi tersebut.

### 2.9.2 Pelanggaran Berupa Berjualan Rokok di Tempat Umum

Informasi tentang pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok berupa berjualan rokok di tempat umum di bagi menjadi 3,yaitu pernah melihat, sering melihat, dan tidak pernah melihat.

Tabel 2.9.2

Melihat Orang lain	Frekuensi	%
<b>Berjualan Rokok di</b>		

**KTR**

<b>Pernah</b>	30	50%
<b>Sering</b>	1	1,7%
<b>Tidak Pernah</b>	29	48,3%
<b>Total</b>	60	100%

Terdapat 50% Responden yang pernah melihat orang berjualan rokok di lokasi tersebut (Kawasan Tanpa Rokok), 1,7% sering, dan 48,3% tidak pernah melihat orang yang melakukan pelanggaran berupa berjualan rokok di lokasi tersebut

### 2.9.3 Pelanggaran Berupa Memproduksi Rokok di Tempat Umum

Informasi tentang pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok berupa memproduksi rokok di tempat umum di bagi menjadi 3, yaitu pernah melihat, sering melihat, dan tidak pernah melihat.

Tabel 2.9.3

<b>Melihat Orang lain</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
<b>Memproduksi</b>		
<b>Rokok di KTR</b>		
<b>Pernah</b>	0	0%
<b>Sering</b>	0	0%
<b>Tidak Pernah</b>	60	100%
<b>Total</b>	60	100%

Terdapat 0% Responden yang pernah melihat orang memproduksi rokok di lokasi tersebut (Kawasan Tanpa Rokok), 0% sering, dan 100% tidak pernah melihat orang yang melakukan pelanggaran berupa memproduksi rokok di lokasi tersebut

#### 2.9.4 Pelanggaran Berupa Menyelenggarakan Iklan Rokok

Informasi tentang pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok berupa menyelenggarakan iklan rokok di tempat umum di bagi menjadi 3, yaitu pernah melihat, sering melihat, dan tidak pernah melihat.

Tabel 2.9.4

<b>Melihat Orang lain Menyelenggarakan Iklan Rokok di KTR</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
<b>Pernah</b>	21	35%
<b>Sering</b>	3	5%
<b>Tidak Pernah</b>	36	60%
<b>Total</b>	60	100%

Terdapat 35% Responden yang pernah melihat orang menyelenggarakan iklan rokok di lokasi tersebut (Kawasan Tanpa Rokok), 5% sering, dan 60% tidak pernah melihat orang yang melakukan pelanggaran berupa menyelenggarakan iklan rokok di lokasi tersebut

#### 2.9.5 Pelanggaran Berupa Mempromosikan Rokok

Informasi tentang pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok berupa Mempromosikan rokok di tempat umum di bagi menjadi 3,yaitu pernah melihat, sering melihat, dan tidak pernah melihat.

Tabel 2.9.5

<b>Melihat Orang lain</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
<b>Mempromosikan Rokok di KTR</b>		
<b>Pernah</b>	12	35%
<b>Sering</b>	7	11,7%
<b>Tidak Pernah</b>	41	68,3%
<b>Total</b>	60	100%

Terdapat 35% Responden yang pernah melihat orang mempromosikan rokok di lokasi tersebut (Kawasan Tanpa Rokok), 11,7% sering, dan 68,3% tidak pernah melihat orang yang melakukan pelanggaran berupa mempromosikan iklan rokok di lokasi tersebut

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa orang yang mengerti kondisi di lingkungan tempat penelitian.

Yang pertama adalah saudara Dito Agung selaku anggota Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.

“Kalau di Fakultas Hukum ini masih sangat sering saya lihat baik itu mahasiswa, dosen, atau orang dari luar Fakultas yang merokok di sekitaran lingkungan Kampus.Bahkan saya pernah melihat orang yang berjualan rokok

di sekitar kampus. Tapi kalau di kelas, saya tidak pernah lihat ada yang merokok. Padahal di pintu masuk kampus Fakultas Hukum sudah terpasang spanduk/poster peringatan bahwa lingkungan ini merupakan Kawasan Tanpa Rokok”

Menurut hasil survey lapangan yang diperoleh, serta informasi yang diperoleh masih banyak orang yang melakukan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut membuktikan bahwa peraturan yang telah di buat Pemerintah belum sepenuhnya efektif

Kinerja dari sebuah peraturan dapat diukur tingkat keberhasilannya apabila ukuran-ukuran dasar dari peraturan tersebut telah sesuai dengan keadaan sosiokultural masyarakat dimana kebijakan peraturan tersebut diterapkan. Bagaimana sebuah kebijakan peraturan dapat dikatakan berhasil apabila keadaan yang sebenarnya belum bisa dapat dikatakan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku

#### **D. Hambatan-hambatan yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya**

Setelah mengetahui aturan Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Perda Pasal 3 Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok efektif atau belum. Maka berikut yang harus diketahui adalah faktor-faktor yang menjadi masalah aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya atau tidak mencapai tujuan hukum atau keberhasilan hukum itu sendiri

Berikut adalah faktor-faktor yang dijadikan indikator oleh penulis untuk mengetahui hambatan dalam mengatasi Pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok

### **1. Faktor Hukum**

Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok diatur mengenai penetapan sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menaati peraturan tersebut. Menurut Ibu Nur Laila besarnya sanksi tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Beliau mengatakan

“Menurut saya sanksi berupa denda sebesar Rp.50.000.000 yang dikenakan kepada pelanggar masih sangat sulit di terapkan”

Karena besaran sanksi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan tersebut tidak berjalan efektif. Semuanya hanya sebatas diberikan teguran dan peringatan. Sanksi yang tinggi memang bermaksud untuk memberikan efek jera namun penetapan sanksi juga harus memperhatikan kondisi masyarakatnya sehingga aturan tersebut dapat ditegakkan

### **2. Faktor Penegak Hukum**

Penegak Hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung di bidang hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Penegak hukum yang



dimaksud dalam hal ini adalah seluruh tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan dalam perda nomor 5 tahun 2008 dan PERWALI Surabaya nomor 25 tahun 2009 yang salah satunya adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada system penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh penegak hukum maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

Untuk mengetahui sejauh mana peranan Dinas Kesehatan Surabaya dalam menangani adanya pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya sesuai dengan Perda Kawasan Tanpa Rokok Nomor 5 Tahun 2008, maka penulis Wawancara dilakukan di Dinas Kesehatan Kotas Surabaya pada tanggal 24 Maret 2018 dengan Ibu Nur Laila selaku pengelola program Penyakit Tidak Menular. Beliau mengatakan

“Salah satu hambatan nya adalah ketika ada orang yang melintas memasuki kawasan tanpa rokok bukan untuk berkunjung/mempunyai keperluan di tempat tersebut, tetapi memang untuk berhenti sejenak dan merokok. Serta orang yang berdomisili di luar Surabaya yang tidak mengetahui akan peraturan yang berlaku”

“Masalah selanjutnya adalah kurang tegas nya pengawasan oleh penanggung jawab di tempat. Misal nya ada petugas keamanan di suatu

sekolah yang tidak menegur seorang guru/siswa yang merokok di lingkungan sekolah”<sup>19</sup>

Karena sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok pada BAB IV Perwali tersebut di jelaskan bahwa setiap daerah baik itu sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, serta angkutan umum mempunyai pemimpin/penanggung jawab yang wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan apabila melihat seseorang terbukti melakukan pelanggaran

Beliau menambahkan :

“Hambatan selanjutnya adalah masih banyak tempat yang belum terpasang papan/poster peringatan dilarang merokok atau menunjukkan bahwa tempat tersebut adalah Kawasan Tanpa Rokok.”

Karena pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkewajiban untuk membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok

Angkutan umum merupakan tempat yang di tetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Namun penerapan nya masih sangat kurang

“Selain itu Hambatan nya adalah sulitnya melakukan pengawasan di angkutan umum, karena angkutan umum tidak menetap di satu tempat.”

---

<sup>19</sup> Wawancara 24 Maret 2018

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, Penegakan Hukum dari Dinas Kesehatan sudah cukup baik. Sosialisasi sudah mulai dilakukan di tempat-tempat yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Papan/Poster peringatan dilarang merokok sudah banyak terpasang di Kawasan Tanpa Rokok. Namun yang menjadi kendala adalah, Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan Pengawasan secara menyeluruh di setiap Kawasan Tanpa Rokok. Butuh pengawas yang dapat memantau kondisi di lapangan dengan lebih baik. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab pengawas di tiap-tiap daerah yang ditetapkan di Kawasan Tanpa Rokok, yang menurut hasil pengamatan dan observasi penulis (wawancara dan pembagian kuisioner) masih sangat kurang.

### **3. Faktor Masyarakat**

Kecenderungan yang besar pada masyarakat mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan peranan faktual penegak hukum terlalu banyak. Padahal, di dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok, telah menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di daerah di mana masyarakat diminta memberikan andil untuk melakukan pengawasan sehingga dapat mewujudkan terciptanya kawasan tanpa rokok.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ialah dengan ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat, menegur setiap orang yang melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok dan melaporkan kepada pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok apabila terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Pasal 3 Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara langsung yang penulis lakukan kepada masyarakat, masyarakat cenderung acuh untuk memberikan teguran langsung kepada pelanggar, padahal masyarakat tersebut telah mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Serta sampai saat ini, dinas kesehatan belum menerima laporan mengenai pelanggaran kawasan tanpa rokok dari masyarakat. Dan berdasarkan Peran serta masyarakat didukung secara legal oleh peraturan daerah, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu menciptakan kawasan tanpa rokok.

Yang termasuk dalam kategori anggota masyarakat adalah setiap warga kota terlepas dari kedudukan dan jabatannya: dapat perseorangan, kelompok, bahkan anggota SKPD dan Pimpinan/Penanggung Jawab kawasan tanpa rokok di masing-masing sarana kawasan tanpa rokok. karena Keberhasilan peraturan daerah ditandai antara lain dengan semakin banyaknya masyarakat yang patuh dan mampu melakukan kontrol sosial

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Penelitian dan Pembahasan yang penulis lakukan maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Pasal 3 Nomor 5 Tahun 2008 masih belum efektif di Surabaya selatan, karena masih banyak daerah yang ditemukan pelanggaran berkaitan dengan isi pasal tersebut. Daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang sudah berlaku efektif hanya terdapat di instansi Kesehatan, seperti rumah sakit, apotek, Dinas Kesehatan Dll.
2. Hambatan-hambatan yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya diantaranya adalah

##### **a) Faktor Hukum**

Besaran sanksi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan tersebut tidak berjalan efektif. Semuanya hanya sebatas diberikan teguran dan peringatan

##### **b) Faktor Penegak Hukum**

Dinas Kesehatan sebagai Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok sudah melakukan tugasnya dengan baik, walaupun masih terfokus menerapkan Pasal

3 Perda Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 hanya di Instansi Kesehatan. Di daerah lain masih sedang dilakukan tahap Pembinaan berupa sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Yang menjadi faktor penghambat terbesar adalah, Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan Pengawasan secara menyeluruh di setiap Kawasan Tanpa Rokok. Butuh pengawas yang dapat memantau kondisi di lapangan dengan lebih baik. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab pengawas di tiap-tiap daerah yang ditetapkan di Kawasan Tanpa Rokok, yang menurut hasil pengamatan dan observasi penulis (wawancara dan pembagian kuisioner) masih sangat kurang.

c) Faktor Masyarakat

Hambatan dari faktor masyarakat antara lain, anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan peranan faktual penegak hukum terlalu banyak, Karena penegak hukum nya kurang tegas maka masyarakatnya juga akan menyepelekan aturan yang berlaku. Selain itu yang jadi penghambat yaitu kurang nya respon masyarakat untuk menegur orang lain yang melakukan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok

**B. Saran**

1. Dinas Kesehatan Kota Surabaya lebih meningkatkan pengawasan pada setiap Kawasan Tanpa Rokok, bukan hanya di instansi kesehatan saja namun di

semua Kawasan Tanpa Rokok. Pemberian sanksi tegas pada pimpinan penanggung jawab juga harus dilakukan di setiap Kawasan Tanpa Rokok

2. Masyarakat juga harus membantu untuk menegur atau melaporkan seseorang yang melanggar di Kawasan Tanpa Rokok.





## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008

Undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Undang-undang nomor 36 tahun 2009

Peraturan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri bernomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa rokok

Siswanto, Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Ani, Sri Rahayu, 2010, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Bumi Aksara

Satjipto, Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru

Sudikno, Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Ishaq, 2012. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono, Soekanto. 1986. *Faktor –faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet ke-2. Jakarta: Rajawali.